

142 BUMN Beraset Rp 4.216,48 Triliun

SOLO - Jumlah badan usaha milik negara (BUMN) kini 142 dengan total aset Rp 4.216,48 triliun dan laba Rp 122,17 triliun, sedangkan badan usaha milik daerah (BUMD) 1.007 dengan total aset Rp 375 triliun.

"Lewat pengelolaan aset dan perolehan laba, BUMN dan BUMD memegang peranan penting dalam perekonomian nasional," tutur Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis, kemarin.

Ia mengungkapkan hal itu ketika

menjadi pembicara kunci seminar "BPK, Pengelolaan Keuangan Negara, dan Kesejahteraan" di auditorium UNS.

Pertanyaannya, menurut dia, dana yang begitu besar apakah sudah dipergunakan secara ekonomis, efisien dan efektif, serta mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Tentu harus ada korelasi antara jumlah uang negara yang digunakan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan," tegas Harry.

Ia menyatakan banyak lembaga

negara, kementerian, dan pemerintah daerah yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) setelah laporan keuangannya diperiksa BPK.

Menyayangkan

Di kalangan lembaga negara atau kementerian ada 64 atau 74% yang menerima opini WTP dari 86 yang menyerahkan laporan keuangan. Pada pemerintah daerah ada 34% atau 153 dari 456 LKPD yang diperiksa 2013.

Namun, ia menyayangkan dari hasil opini WTP itu banyak yang tak berdampak pada peningkatan kemakmuran rakyat jika diukur dengan angka kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi, serta indeks pembangunan manusia (IPM) rendah.

"BPK telah merumuskan suatu sistem, bagaimana laporan keuangan yang mendapatkan WTP bisa berdampak signifikan terhadap kesejahteraan rakyat," tegas dia.

Anggota Komisi XI DPR Abdul Kharis Al-Masyhari mengemukakan masyarakat bisa bertanya kepada kepala daerah, baik bupati, wali kota, maupun gubernur apabila mengetahui laporan keuangan yang mendapat opini WTP tidak menyajjahteraan rakyat.

Hak bertanya itu, menurut dia, wajar karena pada dasarnya rakyat adalah pemilik negara, sedangkan presiden atau kepala daerah adalah orang yang diberi mandat untuk mengatur.

"Seseorang menggunakan hak pilih untuk memilih presiden atau gubernur, bupati, dan wali kota pasti punya keinginan menjadi sejahtera. Nah, kalau pemerintah tidak menyejahterakan rakyat yang memilih, rakyat boleh bertanya, kenapa?" (G8, G19-29)



SM/Langgeng Widodo

SEMINAR BPK : Ketua BPK Harry Azhar Azis membuka seminar bertema "BPK, Pengelolaan Keuangan Negara, dan Kesejahteraan" di auditorium UNS Surakarta, kemarin.(29)